



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 32/M.PPN/HK/03/2018
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR RENCANA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
TAHUN 2018**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
 - b. bahwa Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, disusun dalam rangka meningkatkan partisipasi badan usaha dalam penyediaan infrastruktur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penetapan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
 2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN DAFTAR RENCANA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA TAHUN 2018.**
- PERTAMA** : Menetapkan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

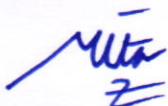
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2018

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum



RR.Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 32/M.PPN/HK/03/2018
TANGGAL 5 MARET 2018

DAFTAR RENCANA
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
TAHUN 2018

PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA KATEGORI SIAP DITAWARKAN

1. Sistem Penyediaan Air Minum Semarang Barat.

PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA KATEGORI DALAM PROSES PENYIAPAN

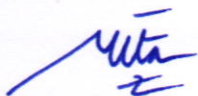
1. Transportasi Perkotaan di Kota Medan;
2. Jalan Tol Semarang - Demak;
3. Jalan Tol Yogya - Bawen;
4. Jembatan Tol Surabaya - Madura;
5. Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pekanbaru;
6. Satelit Multi Fungsi;
7. Sistem Kesejahteraan Sosial Terpadu Nasional;
8. Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta;
9. Rumah Sakit Pendidikan Universitas Sam Ratulangi;
10. Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi di Kota Medan;
11. Pengembangan Rumah Sakit Kanker Dharmais;
12. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo;
13. Lembaga Pemasarakatan Industri di Nusakambangan;
14. Pemindahan lembaga Pemasarakatan dari Pusat Kota ke Pinggiran.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum



RR.Rita Erawati